

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan ditemukan bahwa variabel implementasi yang dikemukakan oleh Grindle mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi kebijakan. Diketahui bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan ada faktor di luar lingkungan program yang mempengaruhi keberhasilan implementasi terutama program yang disinyalir mengandung kepentingan politis. Berdasarkan teori Grindle, pelaksanaan program Asuransi Nelayan dilihat dari isi kebijakan (*content of policy*) terlihat bahwa:

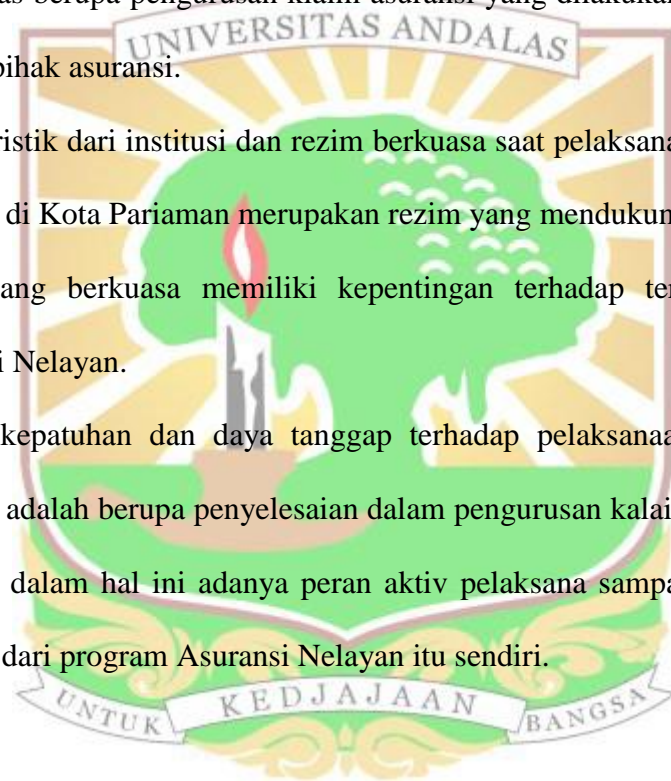
- a. Kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh pelaksana program dan kelompok sasaran dalam hal ini nelayan sudah diakomodir dalam program Asuransi Nelayan, meskipun mempunyai kepentingan berbeda, tetapi hal tersebut telah memberikan manfaat tersendiri kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam program Asuransi Nelayan, akan tetapi, dalam hal kepentingan kelompok sasaran belum mencerminkan bahwa kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang sesuai dengan aspirasi atau keinginan kelompok sasaran karena kelompok sasaran tidak terlibat langsung dalam perumusan program tersebut.
- a. Program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman telah memberikan manfaat kepada nelayan, sebelum dilaksanakan program Asuransi Nelayan nelayan tidak mendapatkan jaminan dalam menjalankan aktifitasnya, setelah program ini dilaksanakan manfaat yang diterima oleh nelayan adalah nelayan mendapatkan kartu asuransi sebagai jaminan apabila terjadi terjadi kecelakaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan dalam realisasinya beberapa nelayan telah

merasakan manfaat dari program asuransi tersebut berupa dana atau jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi.

- b. Perubahan yang terjadi dalam implementasi program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman selama pelaksanaannya adalah terasuransikannya nelayan, walaupun belum semua nelayan diasuransikan karena terkendala oleh anggaran, dalam program Asuransi Nelayan ini Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai pedoman atau skala/derajat perubahan yang jelas yang menjadi indikator atau alat ukur kesuksesan dari program Asuransi Nelayan, derajat perubahan yang diharapkan hanya terasuransikannya seluruh nelayan.
- c. Program Asuransi Nelayan yang telah diimplementasikan sudah tepat letak dan sasarannya, program ini sudah direalisasikan dan ditujukan untuk para nelayan
- d. Dalam program Asuransi Nelayan pelaksana program telah dijelaskan dengan rinci dan mempunyai kapasitas dan kemampuan, terdapat 2 aktor pelaksana dari program yang berasal dari lembaga resmi, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak asuransi Bumida Bumiputera cabang Padang, masing-masing aktor mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda tetapi tetap fokus dalam menyukseskan program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman.
- e. Program Asuransi Nelayan memiliki sumber daya yang jelas, dalam hal ini sumber daya anggaran, anggaran pelaksanaan program Asuransi Nelayan bersumber dari dana APBD kota Pariaman yang diambil dari dana Hibah dan Bansos, akan tetapi pada tahun 2015 anggaran ini tidak dapat digunakan lagi karena adanya pelarangan dari Kementerian Dalam Negeri terhadap penggunaan dana Hibah dan Bansos tersebut.

Pelaksanaan program Asuransi Nelayan dilihat dari lingkungan implementasi (*context of implementation*) terlihat bahwa:

- a. Kekuasaan, kepentingan pada saat program Asuransi Nelayan dilaksanakan merupakan kekuasaan yang mendukung terhadap program kesejahteraan nelayan ini, sedangkan dalam hal kepentingan, didalam program Asuransi Nelayan semua kepentingan-kepentingan yang ada sudah diakomadir dan masing-masing kepentingan tersebut mendapatkan manfaat dari program Asuransi Nelayan. Sedangkan mengenai strategi yang digunakan dalam menyukseskan program Asuransi Nelayan adalah berupa adanya bantuan administratif yang dilakukan oleh dinas berupa pengurusan klaim asuransi yang dilakukan oleh dinas langsung kepada pihak asuransi.
- b. Karakteristik dari institusi dan rezim berkuasa saat pelaksanaan program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman merupakan rezim yang mendukung program ini, karena rezim yang berkuasa memiliki kepentingan terhadap terlaksananya program Asuransi Nelayan.
- c. Bentuk kepatuhan dan daya tanggap terhadap pelaksanaan program Asuransi Nelayan adalah berupa penyelesaian dalam pengurusan kalaim yang diajukan oleh nelayan, dalam hal ini adanya peran aktiv pelaksana sampai nelayan merasakan manfaat dari program Asuransi Nelayan itu sendiri.



6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dilakukan penelitian lanjutan sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.
2. Kelemahan penelitian ini belum meliti secara kuantitatif kepada para nelayan akan tetapi lebih terfokus pada penelitian kualitatif. Untuk dapat mengukur pengaruh

implementasi program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman disarankan untuk mengkaji dengan penelitian kuantitatif.

3. Sebaiknya sebuah proses implementasi program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebaiknya terlepas dari variabel yang berkaitan dengan kepentingan, baik itu kepentingan kelompok, individu, kepentingan rezim yang sedang berkuasa maupun kepentingan politik, karena hal ini akan menjadi beban bagi pelaksana nantinya dan menimbulkan kendala dalam proses implementasi karena tumpang-tindihnya kepentingan yang terlibat.
4. Implementasi kebijakan sebaiknya dilaksanakan pada waktu yang tepat, supaya dapat menjawab apa yang diharapkan oleh kelompok sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari kelompok sasaran.
5. Dalam banyak kebijakan, kegagalan dari implementasi banyak bersumber dari lemahnya anggaran yang tersedia, berangkat dari pengalaman penelitian ini sebaiknya dalam implementasi kebijakan menyediakan anggaran cadangan, tujuannya adalah agar terjaminnya kelancaran implementasi kebijakan.
6. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Pariaman mencarikan solusi anggaran untuk melanjutkan melaksanakan program Asuransi Nelayan yang sempat terhenti pada tahun 2015 misalnya dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility).

